

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Inflasi Oktober

Inflasi Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober 2024 tercatat mengalami Inflasi Sebesar 0,21% m-to-m dan 1,63% y-on-y. Inflasi tersebut menurun dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Sulawesi Barat pada Bulan September dengan angka inflasi sebesar 0,33% m-to-m dan turun 0,42 point dari Inflasi tahunan sebesar 2,05%. Angka inflasi Provinsi Sulawesi Barat ini tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional pada Oktober 2024 sebesar 1,71% y-on-y.

Inflasi tahunan di Sulawesi Barat tertinggi dipegang oleh Kabupaten Mamuju dengan Inflasi sebesar 2,02 y-on-y dan Kabupaten Majene mengalami Inflasi terendah dengan Inflasi sebesar 1,36%. Sedangkan Inflasi bulanan Provinsi Sulawesi Barat tertinggi terjadi pada Kabupaten Majene dengan angka inflasi sebesar 0,26% m-to-m dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Mamuju dengan inflasi sebesar 0,13% m-to-m

Inflasi Sulawesi Barat pada Bulan Oktober 2024 dipengaruhi oleh kenaikan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran terutama kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,07% y-on-y dan 0,18 m-to-m, kemudian diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dengan andil sebesar 0,13 y-on-y dan 0,02 m-to-m

Adapun Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y adalah Komoditas Ikan Layang sebesar 0,19%, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,15% dan kopi bubuk sebesar 0,14% sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi y-on-y adalah Cabai Merah sebesar 0,21%, Ikan Bandeng 0,05% dan Tomat sebesar 0,05%. Secara bulan komoditas yang memberikan andil inflasi/sumbangan inflasi adalah Komoditas Bawang Merah sebesar 0,07%, Telur Ayam Ras 0,06% dan Jeruk Nipis sebesar 0,04%, sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi pada bulan Oktober adalah Komoditas Ikan Cakalang 0,07%, Ikan Layang 0,05% dan Cabai Merah 0,04%.

Inflasi pada bawang merah disebabkan kerana menurunnya pasokan bawang merah dari daerah Enrekang (Provinsi Sulawesi Selatan) akibat menurunnya Jumlah Produksi Bawang Merah karena curah hujan yang tinggi sangat mempengaruhi penurunan jumlah produksi Bawang Merah. Hal ini juga terjadi pada penurunan Pasokan Telur Ayam Ras dari produsen Telur Ayam Ras dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Provinsi Sulawesi Selatan) diikuti dengan peningkatan permintaan Telur Ayam Ras karena masih adanya Perayaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sedangkan Komoditas Jeruk Nipis juga mengalami kenaikan harga karena meningkatnya tekanan harga jeruk nipis di dorong oleh penyesuaian harga pada tingkat distributor yang ada di Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan). Namun Inflasi pada Oktober di Sulawesi Barat tercatat menurun dari Inflasi dibulan September hal ini di dorong oleh Penurunan harga pada Komoditas Ikan Cakalang dan Ikan Layang, seperti yang telah diketahui bahwa komoditas Ikan Layang maupun Cakalang sangat besar mempengaruhi Inflasi di Sulawesi Barat. Penurunan Harga Ikan Cakalang dan Ikan Layang dipengaruhi oleh Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan karena Gelombang Laut yang tidak Tinggi sehingga nelayan lebih banyak memperoleh hasil tangkapan Sedangkan Komoditas Cabai Merah yang mengalami penurunan harga karena peningkatan produksi di daerah penghasil cabai merah sehingga memicu penurunan harga cabai merah

pada bulan Oktober Bawang Merah mengalami kenaikan dari harga rata-rata Rp. 29.167,-/Kg menjadi Rata-rata Rp. 30.285/Kg dan Harga Telur Ayam Ras mengalami kenaikan dari harga rata-rata Rp. 28.367,-/Kg pada September menjadi Rp. 28.657,-/Kg. Namun kenaikan harga ini tidak mempengaruhi daya beli masyarakat di Sulawesi Barat karena harga Bawang Merah dan telur ayam ras masih berada di bawah HET/HAP dimana HAP untuk Bawang Merah sebesar Rp. 36.500,-/Kg dan Telur Ayam Ras sebesar Rp. 30.000,-/Kg.

b. Inflasi November

Inflasi Provinsi Sulawesi Barat pada bulan November 2024 tercatat mengalami Inflasi sebesar 1,63% y-on-y inflasi tahunan ini mengalami penurunan 0,45 point dari Inflasi Oktober 2024 yang tercatat sebesar 1,63%. Sedangkan secara bulanan Provinsi Sulawesi Barat mengalami Deflasi sebesar 0,17% m-to-m. inflasi Tahun Provinsi Sulawesi Barat berada dibawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,55% y-on-y dan dari inflasi bulanan nasional yang tercatat sebesar 0,30% m-to-m.

Inflasi tahunan di Sulawesi Barat tertinggi dipegang oleh Kabupaten Mamuju dengan Inflasi sebesar 2,07% y-on-y dan Kabupaten Majene mengalami Inflasi terendah dengan Inflasi sebesar 0,63% y-on-y. Sedangkan secara bulanan semua Kabupaten IHK di Sulawesi Barat mengalami Deflasi dimana deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Mamuju dengan nilai Deflasi sebesar -0,37% m-to-m dan Kabupaten Majene mengalami deflasi sebesar -0,04% m-to-m

Deflasi Sulawesi Barat pada Bulan November 2024 dipengaruhi sebagian besar oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar -0,17% m-to-m dengan angka deflasi sebesar -0,44% m-to-m. kelompok lain yang juga memberikan andil deflasi di Sulawesi Barat adalah Kelompok Pengeluaran Transportasi dengan andil deflasi sebesar -0,02% m-to-m dengan angka deflasi pada bulan November 2024 sebesar -0,19% m-to-m

adapun Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y adalah Komoditas Ikan Layang sebesar 0,31%, Bawang Merah sebesar 0,24% dan Sigaret Kretek Mesin (SKM sebesar 0,17%, sedangkan Komoditas yang dominan memberikan andil Deflasi Tahunan adalah Cabai Merah sebesar 0,55%, Pisang sebesar 0,11% dan Cabai Rawit sebesar 0,09%. Secara bulanan Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah Komoditas Ikan Layang sebesar 0,12%, beras sebesar 0,11% dan Pisang sebesar 0,10%. Dan komoditas yang memberikan andil inflasi m-to-m adalah komoditas Tomat sebesar 0,27%, Bawang Merah sebesar 0,18% dan Minyak Kelapa sebesar 0,03%.

Penurunan harga pada Komoditas Ikan Layang dan Beras sangat mempengaruhi terjadinya deflasi di Sulawesi Barat karena Ikan Layang dan Beras memiliki bobot tertinggi dalam penilaian angka inflasi di Sulawesi Barat sehingga kenaikan atau penurunan harga pada kedua komoditas ini akan mempengaruhi angka inflasi/deflasi di Sulawesi Barat sebagaimana berdasarkan Survey Biaya Hidup yang dilakukan oleh BPS (2022) bahwa Beras memiliki bobot sebesar 6,22% dan Ikan Layang dengan bobot sebesar 2,14%. Deflasi pada Ikan Layang disebabkan oleh kenaikan hasil tangkapan ikan laut nelayan seiring dengan stabilnya volatilitas gelombang laut diperairan Sulawesi Barat. Penurunan harga beras disebabkan oleh meningkatnya suplai pasokan dari luar Provinsi Sulawesi Barat utamanya dari Kabupaten Pinrang (Provinsi Sulawesi Selatan) akibat dari Produksi yang meningkat di daerah tersebut selain itu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terus-menerus melakukan Gerakan Pangan hampir setiap hari menyebabkan harga beras menjadi turun utamanya di wilayah Kabupaten Kota IHK. Sedangkan penurunan harga pisang disebabkan karena produksi pisang

pada saat masa panen akhir tahun dari Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan untuk komoditas yang menyumbangkan inflasi pada Bulan November 2024 seperti Tomat dan Bawang Merah masih berpengaruh dari bulan Oktober dimana Tomat dan Bawang Merah masih mengalami peningkatan harga dan terus mengalami peningkatan harga pada bulan November 2024 ini. Pada November 2024 ini Produksi Tomat dan Bawang Merah terus mengalami penurunan

Pada bulan November 2024 rata-rata komoditas pangan mengalami penurunan harga utamanya Harga Beras yang mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata harga komoditas pada Bulan Oktober 2024., untuk beras Medium mengalami penurunan dari harga rata-rata Rp.12.558,-/Kg pada Bulan Oktober Turun menjadi rata-rata Rp.12.249,-/Kg, selain itu harga beras premium juga mengalami penurunan harga dari harga rata-rata Rp. 13.867,-/Kg menjadi rata-rata Rp. 13.595,-/Kg dan harga beras ini berada dibawah HET beras medium dengan HET Rp. 12.500,/Kg dan HET beras premium sebesar Rp. 14.900,-/Kg. selain beras komoditas yang juga mengalami penurunan harga adalah Komoditas Perikanan dimana Ikan layang mengalami penrunan harga dari harga rata-rata Rp. 31.191,-/Kg pada Bulan Oktober turun menjadi rata-rata Rp. 24.265,-/Kg pada Bulan November 2024. Ikan Cakalang turun dari harga rata-rata Rp.24.728,-/Kg menjadi rata-rata Rp. 21.526,-/Kg dan Ikan Kembung juga mengalami penurunan harga dari harga rata-rata Rp. 33.980,-/Kg menjadi rata-rata Rp. 29.819,-/Kg. Komoditas Cabai juga mengalami penurunan harga dimana harga cabai merah keriting turun dari harga rata-rata Rp. 24.901,-/Kg menjadi rata-rata Rp. 23.721,-/Kg, Cabai Rawit Merah juga turun dari harga rata-rata Rp. 39.309,-/Kg menjadi rata-rata Rp. 32.612,-/Kg.

Pada Bulan November Komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah Komoditas Tomat dan Bawang Merah. Komoditas Tomat mengalami kenaikan harga yang sangat drastic dari harga rata-rata Rp. 5.904 pada Bulan Oktober menjadi rata-rata Rp. 10.084,-/Kg dan Bawang Merah Naik dari harga Rata-rata Rp. 30.285,-/Kg menjadi rata-rata Rp. 40.425,-/Kg.

c. Inflasi Desember

Inflasi Sulawesi Barat pada Bulan Desember 2024 tercatat mengalami Inflasi sebesar 1,49% *y-on-y* inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 dengan angka inflasi 1.82% turun 0,33 Point. Sedangkan inflasi bulanan Sulawesi Barat pada Desember 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66% naik 0,83 Point dari bulan November 2024 yang mengalami deflasi sebesar -0,17%. Inflasi Sulawesi barat pada Desember 2024 ini masih berada di bawah angka inflasi nasional sebesar 1,57%.

Angka inflasi Sulawesi Barat yang sebesar 1,49% ini menunjukkan bahwa kenaikan harga di Provinsi Sulawesi Barat tergolong terkendali, mendekati batas bawah dari target inflasi nasional. Secara umum, inflasi yang rendah seperti ini dapat mencerminkan stabilitas harga yang relatif baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah, serta kebijakan fiskal dan sektor lainnya, mampu menjaga tekanan inflasi di wilayah Sulawesi Barat

Inflasi antar wilayah di Sulawesi Barat pada 2 daerah cakupan IHK, Inflasi tertinggi dialami oleh Kabupaten Mamuju dengan angka Inflasi sebesar 2,47% dan terendah dialami oleh Kabupaten Majene dengan angka inflasi sebesar 0,87%.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya inflasi ini bisa jadi karena adanya penurunan

harga bahan pangan yang terjadi di Kabupaten Majene dimana Kabupaten Majene sebagai salah satu kota IHK pada Desember 2024 ini mengalami inflasi sebesar 0,86% berada dibawah rentan Nasional $2,5 \pm 1$ %. Selain itu, meskipun Sulawesi Barat mengalami inflasi, angka yang berada di bawah 1,5% menunjukkan bahwa inflasi di provinsi tersebut tetap sesuai dengan sasaran ekonomi yang lebih luas.

Inflasi Sulawesi Barat mengalami kenaikan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran baik *y-on-y* dan *m-to-m* yaitu Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 1,17% (*y-on-y*) dan 0,67% (*m-to-m*) sedangkan yang memberikan andil tekanan deflasi terbesar pada bulan Desember adalah kelompok perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi pada bulan Desember secara *m-to-m* adalah Komoditas Tomat sebesar 0,32%, Ikan Layang sebesar 0,08% dan Beras sebesar 0,07% kenaikan harga komoditas ini disebabkan oleh penurunan produksi tomat dan cabai merah pada tingkat petani, khususnya dari luar Sulbar (wilayah tengah Provinsi Sulawesi Selatan) akibat tingginya intensitas curah hujan membuat harga kedua komoditas tersebut meningkat. Sementara itu, harga beras turut mengalami kenaikan akibat telah berakhirnya musim panen yang terjadi pada awal triwulan IV 2024 dan mulai memasuki masa tanam pada akhir tahun 2024. Kemudian, terjadinya inflasi pada ikan layang dan ikan cakalang didorong oleh tingginya volatilitas tinggi gelombang laut di wilayah perairan Sulbar sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi tidak optimal.

Namun demikian, capaian inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas, seperti jeruk nipis/limau, ikan kembung, cabai rawit, angkutan udara, dan emas perhiasan. Kenaikan pasokan jeruk nipis dari Sulawesi Selatan dan cabai rawit dari daerah pegunungan Kab. Mamuju menjadi faktor utama menurunnya harga kedua komoditas tersebut. Lalu, meningkatnya suplai ikan kembung dari luar Sulbar (wilayah pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah) membuat komoditas ini mengalami deflasi

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan pemetaan dan identifikasi permasalahan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi pada periode triwulan IV (Oktober, November dan Desember). adapun permasalahan tersebut didasarkan pada 4 strategi pengendalian inflasi adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

Tingginya permintaan jelang Hari Besar Keagamaan yakni Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW dan Jelang Natal Tahun 2024 dan Tahun 2025, mendorong Pedagang untuk menaikkan harga apa lagi dtunjang dengan semakin menurunnya produksi akibat cuaca ektrim/curah hujan yang tinggi

Gerakan Pangan Murah yang secara rutin di lakukan oleh Pemerintah Daerah menyebabkan keresahan di kalangan pedagang yang ada di pasar karena penjualannya yang semakin menurun

2. Ketersediaan Pasokan

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah dengan tingkat ketergantungan akan pasokan

diluar wilayah Sulawesi Barat masih sangat tinggi khususnya dalam Penyediaan Pasokan Pangan seperti beras, cabai dan bawang yang banyak di dapat dari daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga ketika pasokan dari daerah tersebut berkurang maka akan sangat mempengaruhi ketersediaan pasokan di Wilayah Sulawesi Barat

3. Kelancaran Distribusi

Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan sebagai contoh masih banyaknya jalan-jalan yang rusak serta masih berjalannya proses perbaikan infrastruktur jalan, hal ini mempengaruhi proses distribusi barang ke berbagai daerah di Sulawesi Barat

4. Komunikasi Efektif

Masih kurangnya pemahaman konsumen akan informasi harga utamanya Harga HET atau HAP suatu barang sehingga konsumen memilih untuk langsung membeli barang meskipun dengan harga yang mahal tanpa melalui proses negosiasi dan memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejumlah upaya dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat untuk menjaga stabilitas harga sejumlah bahan pokok selama triwulan IV 2024. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta *stakeholders* terkait terus bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, upaya yang dilaksanakan berdasarkan 4 strategi pengendalian inflasi antara lain :

1. Keterjangkauan Harga

Dalam menjaga keterjangkauan harga sepanjang periode triwulan IV 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan berbagai upaya diantaranya melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten berkoordinasi dalam melakukan pemantauan harga setiap hari senin sampai dengan jumat melakukan Pemantauan Harga di Pasar tradisional yang ada di Wilayah Kabupaten yang dilaporkan setiap hari melalui SP2KP dan laporan langsung ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kegiatan ini dilakukan untuk mengawasi terjadinya lonjakan harga di pasar, mencegah terjadinya penimbunan barang oleh pihak pedagang ataupun distributor, Sidak pasar bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Satgas Pangan) guna melakukan pengawasan terhadap ketidakwajaran kenaikan harga, ketersediaan pasokan serta praktek penimbunan barang yang mungkin terjadi, melaksanakan Gerakan Pangan Murah hamper setiap hari, Pasar Murah ini dilakukan guna menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, dapat membantu masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari adapun Bahan pokok yang dijual dibawah harga pasaran sebanyak 38 Kali.

2. Ketersediaan Pasokan

Dalam menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan IV 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan upaya dalam rangka peningkatan produksi pertanian guna pemenuhan kebutuhan pangan di Sulawesi Barat utamanya komoditas

penyumbang inflasi seperti Beras, Ikan, cabai rawit dan Bawang Merah, selama periode triwulan IV ini TPID telah melakukan berbagai upaya antara lain :Gerakan Menanam dengan menyalurkan bantuan bibit tanaman hortikultura seperti Sukun, Durian dan Tanaman Sayuran kepada kelompok tani di 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Menyalurkan Bibit Ikan Nila dan Ikan Bandeng kepada Kelompok Tani Tambak sebanyak 500.000 Bibit Ikan Nila di Seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dan 16.061 Ekor Benih Ikan Bandeng di Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Menyalurkan bantuan mesin katinting sebanyak 71 Unit kepada Kelompok Nelayan di Kabupaten Pasangkayu, Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Mamuju Tengah, melakukan rehabilitasi Pabrik Es *Cold Storage* di PP Palipi Majene juga memberikan bantuan *Freezer Chest* sebanyak 2 Unit di Kec. Banggae Kab. Majene, Bantuan Cool Box 55 Unit di Kab. Mamuju. Pemberian bantuan ini diperuntukkan bagi Kelompok Nelayan guna penyimpanan dan mengurangi kerugian bagi nelayan/pedagang ikan akibat pembusukan ikan segar, sehingga memungkinkan untuk pengatur produksi dan distribusi ikan, memberikan Bantuan Purse Sein sebanyak 3 Unit di Kab. Mamuju. Pemberian Purse Sein ini sangat berguna selain untuk meningkatkan produksi penangkapan ikan juga untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat penggunaan Bom dan Racun dalam penangkapan Ikan

3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi di Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan IV 2024, TPID Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya :melakukan koordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa Nosu Kabupaten Mamasa untuk memudahkan pemasaran produk pertaniannya untuk di pasarkan ke beberapa daerah yang ada di Sulawesi Barat, melakukan koordinasi dengan pusat pembibitan ikan nila yang ada di Kabupaten Polman untuk melihat ketersediaan bibit ikan nila untuk penyerahan bantuan bibit ikan nila, memberikan bantuan mobil pick up untuk pemasaran ikan sebanyak 1 unit di Kec. Simboro Kab. Mamuju.

4. Komunikasi Efektif

Dalam rangka untuk menjaga komunikasi efektif dalam pengendalian Inflasi TPID Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat-rapat Koordinasi, peningkatan kapasitas bagi TPID, penyebarluasan harga dan stok pangan melalui penyerbaluasan informasi harga pangan melalui Panel Harga Pangan dan Penyusunan Neraca Pangan, melakukan High Level Meeting sebanyak 2 kali yakni menyikapi kenaikan inflasi pada September 2024 dan menyikapi kenaikan harga jelang Pilkada, Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, menyelenggarakan *Capacity Building dan Study Visit* Ke Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 13 -16 November 2024, memantau neraca pangan secara rutin agar pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan pasokan yang dapat memengaruhi harga pangan. Langkah-langkah antisipatif, seperti pengaturan impor, distribusi, atau kebijakan harga, dapat diambil untuk mencegah lonjakan harga pangan yang dapat memperburuk inflasi. Oleh karena itu, neraca pangan menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, yang berperan dalam mengendalikan inflasi secara keseluruhan. Penyusunan Neraca Pangan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menggambarkan kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Sulawesi Barat

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Barat pada triwulan IV 2024 yang melibatkan empat aspek utama: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan,

Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

Upaya pemantauan harga harian dan sidak pasar bersama Satgas Pangan sangat efektif dalam mengidentifikasi potensi lonjakan harga dan penimbunan barang. Kegiatan ini juga memberikan efek jera bagi pelaku pasar yang tidak mematuhi aturan, sehingga bisa menjaga kestabilan harga. Gerakan Pangan Murah yang dilakukan hampir setiap hari dengan menyediakan bahan pokok di bawah harga pasar terbukti dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Frekuensi yang tinggi menunjukkan keseriusan dalam menjaga harga pangan tetap terjangkau

Tantangannya adalah Meskipun sudah ada upaya signifikan, tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan kegiatan Gerakan Pangan Murah agar tidak hanya memberikan dampak sementara. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap kualitas barang yang dijual di bawah harga pasar, untuk memastikan tidak ada komoditas yang mengalami penurunan kualitas atau tidak sesuai standar

2. Ketersediaan Pasokan

Program penyaluran bibit tanaman dan bantuan peralatan pertanian/perikanan sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah. Bantuan seperti mesin katinting dan Purse Sein dapat meningkatkan kapasitas nelayan untuk menangkap ikan tanpa merusak lingkungan, serta membantu menjaga stok ikan di pasaran. Rehabilitasi pabrik es dan penyediaan perangkat penyimpanan seperti freezer dan cool box sangat mendukung untuk mengurangi pembusukan ikan dan mengoptimalkan distribusi hasil perikanan.

Tantangannya adalah Walaupun upaya ini sudah baik, keberhasilan jangka panjang sangat tergantung pada pengawasan dan pelatihan lebih lanjut kepada penerima bantuan untuk memastikan pemanfaatan yang optimal. Selain itu, distribusi bibit dan bantuan lainnya harus terus dipantau untuk memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat dan diterima oleh yang membutuhkan

3. Kelancaran Distribusi

Koordinasi dengan kelompok tani dan pusat pembibitan ikan sangat penting untuk memastikan pasokan bahan pangan dan ikan dapat didistribusikan dengan baik ke berbagai daerah. Bantuan mobil pick-up juga sangat membantu nelayan dalam mendistribusikan ikan ke pasar lebih efisien, mengurangi biaya transportasi dan memperlancar distribusi.

Tantangannya adalah diperlukan perhatian lebih pada keberlanjutan distribusi barang di tingkat lokal. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan bantuan kendaraan harus dipastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan memastikan distribusi berjalan tepat sasaran

4. Komunikasi Efektif

Rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas bagi TPID sangat efektif untuk menjaga komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengendalian inflasi. High Level Meeting juga menunjukkan perhatian serius terhadap potensi lonjakan harga, terutama pada

periode tertentu seperti menjelang Pilkada dan perayaan besar lainnya, Penyusunan dan pemantauan Neraca Pangan sangat penting dalam memberikan gambaran yang jelas tentang ketersediaan pangan di daerah, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat segera diambil untuk menghindari kekurangan pasokan dan lonjakan harga.

Tantangannya adalah Komunikasi yang dilakukan di tingkat TPID harus lebih diperluas kepada masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi benar-benar diterima dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, hasil dari kegiatan capacity building harus diikuti dengan implementasi yang jelas di lapangan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menghadapi inflasi pada Triwulan IV, utamanya dalam menghadapi tantangan inflasi kedepan. TPID Provinsi Sulawesi Barat telah merilis usulan atau rekomendasi kebijakan dalam rangka mengendalikan inflasi serta mengontrol ketersediaan pangan. Adapun rekomendasi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan dan Memperluas Jangkauan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk mengurangi lonjakan harga di daerah-daerah tertentu yang tidak dijangkau oleh pasar khususnya daerah - daerah terpencil
2. Menjamin Kualitas pangan yang disalurkan dalam Gerakan Pangan Murah tetap terjaga, selain itu penting untuk mengawasi ketersediaan pangan yang tepat untuk menghindari kelangkaan barang yang dapat menyebabkan spekulasi harga
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Satuan Tugas Pangan untuk senantiasa memantau pergerakan harga pangan utamanya jelang Hari Besar Keagamaan dan Memperkuat penegakan hukum terhadap praktik spekulasi harga yang dapat memperburuk inflasi dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara berbelanja bijak dan tidak menyikapi kenaikan harga dengan reaksi negative yang memicu panic buying atau penumpukan barang
5. Penerapan teknologi inovasi dalam pengendalian inflasi, terutama dalam peningkatan produksi pangan, sangat penting untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam sektor pertanian, diharapkan dapat tercapai peningkatan produksi pangan yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya membantu menstabilkan harga dan mengurangi tekanan inflasi.
6. Menciptakan ekosistem bisnis dengan melibatkan Perbankan, sektor swasta, perguruan tinggi dan Off Taker guna pengembangan usaha bagi para petani maupun usaha kecil menengah sehingga mereka dapat terus beroperasi tanpa menaikkan harga produksi secara drastic.
7. Penguatan kerjasama antar daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama dalam menghadapi potensi gangguan distribusi atau fluktuasi harga. Kerjasama ini memungkinkan distribusi pangan yang lebih merata dan tepat waktu, mengurangi kesenjangan pasokan antar daerah, serta mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat menyebabkan lonjakan harga.
8. Penyediaan Aplikasi terkait Pelaporan Pengendalian Inflasi di Sulawesi Barat yang dapat diakses oleh berbagai pihak sebagai alat untuk komunikasi dengan sektor swasta dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi diketahui dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan